

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan mungkin dapat menjadi suatu hal yang bisa dijadikan untuk perdebatan karena pembangunan dapat dilihat dalam perspektif dan ukuran yang berbeda. Hal ini merupakan pembangunan hendaknya mencakup kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Pembangunan awalnya hanya ditujukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi suatu negara, namun pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu akan menghasilkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi pada negara berkembang (Prawoto, 2016).

##### **a. Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui sumber daya manusia yang mencakup untuk dapat melaksanakan pembangunan. Dengan adanya sumber daya manusia yang baik maka dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang semakin lancar dalam berbagai sektor. Maka kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM

(Haryadi & Riani, 2018). Hendaknya pemerintah dapat memperhatikan hal tersebut terutama jika subjek dan objek pembangunan yaitu manusia, sehingga pembangunan manusia yang kemudian dapat mencakup pembangunan di berbagai sektor dan akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada pada suatu wilayah pemerintahan tersebut. Pada sebagian negara khususnya negara yang sedang berkembang pembangunan manusia sangatlah penting hal ini disebabkan karena banyaknya negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi, masih gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan dapat meningkatkan kemiskinan (Azahari & Trisakti, 2000).

#### **b. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia**

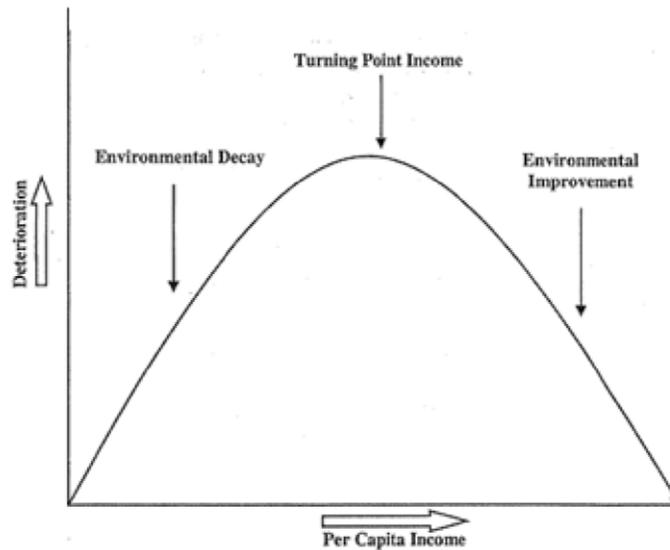
Menurut (Hudiyanto, 2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan suatu indikator pembangunan yang dimunculkan oleh UNDP, yang dinyatakan bahwa jika ingin kehidupan yang lebih baik tidak hanya diukur secara ekonomi saja melainkan mempertimbangkan tiga komponen yaitu panjangnya umur manusia, pendidikan dan standar hidup.

Indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur untuk tingkat kesejahteraan dapan dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran konsumsi. Indeks pembangunan manusia diperlukan guna

dapat menggolongkan suatu Negara dalam Negara maju, Negara berkembang atau bahkan Negara terbelakang serta untuk dapat mengukur dan menentukan kebijakan ekonomi pada peningkatan kesejahteraan negara.

UNDP telah membuat indikator pembangunan yang lain, untuk penambahan beberapa indikator yang telah ada. Dasar yang melandasi ide tersebut untuk pentingnya memperhatikan kualitas sumberdaya manusia. Menurut UNDP, pembangunan harusnya ditujukan terhadap pembangunan sumber daya manusia. Dalam hal ini dapat didasari oleh oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya jalan hidup manusia yang bebas (Sosilawati, 2017).

Hampir bersamaan dengan digunakannya IPM, pada tahun 1991 mulai diperkenalkan *Environmental Kuznetz Curve* atau kurva lingkungan kuznetz yang dibuat oleh Simon Kuznet. Kurva lingkungan kuznetz merupakan modifikasi dari kurva kuznetz yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1954. Tingkat pembangunan sebuah negara yang diwakili indikator indeks pembangunan manusia menunjukkan semakin maju negara tersebut maka kondisi lingkungan secara makro akan baik.



Sumber: Yandle, Vijayaraghavan, Bhattarai (2002)

**GAMBAR 2.1**  
**Kurva Lingkungan Kuznets**

Kurva Lingkungan Kuznetz adalah penjelasan hipotetik yang menyatakan hubungan antara tingkat kerusakan lingkungan dengan pendapatan per kapita. Pada masa awal pembangunan, tingkat kerusakan lingkungan akan cenderung naik tapi kemudian mencapai titik balik dan dengan seiring naiknya pendapatan perkapita akan muncul usaha dan kesadaran untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Aspek pendapatan yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu aspek pengukuran standar kelayakan hidup yang diwakili oleh Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Negara yang bersangkutan.

### c. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Rumus umum yang dapat digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia yaitu sebagai berikut:

$$(2.1) \quad \text{IPM} = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3) \dots\dots\dots$$

Dimana:

$X_1$  = Indeks Harapan Hidup

$X_2$  = Indeks Pendidikan

$X_3$  = Indeks Standar Hidup Layak

Dari setiap komponen diatas akan terlebih dahulu untuk dihitung indeksnya kemudian akan menghasilkan nilai antar 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Biasanya indeks akan menghasilkan angka yang lebih bagus jika dikalikan 100 untuk memudahkan dalam analisa. Untuk penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus dasar yang sebagai berikut:

$$(2.2) \quad \text{IPM} = \sum_{i=1}^3 I_i: I_i = \frac{X_i - \text{Min}X_i}{\text{Max}X_i - \text{Min}X_i} \dots\dots\dots$$

Keterangan:

$I_i$  = Indeks komponen IPM ke I dimana  $I = 1, 2, 3$

$X_i$  = Nilai indikator komponen IPM ke  $i$

Max  $X_i$  = Nilai maksimum  $X_i$

Min  $X_i$  = Nilai minimum  $X_i$

#### **d. Komponen Indeks Pembangunan Manusia**

Komponen tersebut merupakan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

- 1) Angka Harapan hidup (AHH) saat lahir merupakan menunjukkan rata-rata seberapa banyak tahun yang dapat diperoleh oleh seseorang sejak lahir. AHH sesuatu yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat dan diperhitungkan melalui hasil sensus penduduk.
- 2) Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengukur menjalani pendidikan formal. Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.
- 3) Angka Harapan Lama Sekolah merupakan lama sekolah yang akan dirasakn terhadap anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Angka harapan lama sekolah dapat dihitung melalui penduduk yang berusia 7 thun ke atas. Angka harapan lama sekolah ini dapat mengukur perkembangan pembangunan memlalui system pendidikan.

Standar hidup layak dengan indikator pengeluaran perkapita dapat ditentukan melalui pengeluaran perkapita dan kapasitas daya beli (*Purchasing Power Parity*) data dapat diperoleh melalui sensus, dan dapat dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Kemudian dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita yang dibuat konstan atau riil dengan tahun (Sendow dkk, 2018). Berdasarkan kajian mengenai Indeks Pembangunan Manusia menurut UNDP, untuk mengetahui capaian Indeks Pembangunan Manusia antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan kedalam beberapa kategori, yaitu:

- a)  $IPM < 60$  : IPM rendah
- b)  $60 < IPM < 70$  : IPM sedang
- c)  $70 < IPM < 80$  : IPM tinggi
- d)  $IPM < 80$  : IPM sangat tinggi

## **2. Upah Minimum Kabupaten/Kota**

### **a. Pengertian Upah Minimum**

Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, Ayat 30 Upah merupakan hak bagi para pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau tempat kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja atau kesepakatan. Peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi para pekerja atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Menurut (Hutagahung, 2017) menjelaskan bahwa upah minimum merupakan upah yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas permintaan dewan pengupahan, berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup minimum perbulannya. Upah minimum dapat dibagi menjadi:

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Provinsi (UMP) merupakan upah yang besarnya dapat ditentukan oleh dewan pengupahan yang terdapat pada setiap masing-masing kabupaten/kota dan dapat disesuaikan terhadap kebutuhan minimumnya.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota Sektoral (UMKS) atau Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMKPS) merupakan merupakan upah yang besarnya dapat ditentukan oleh dewan pengupahan yang terdapat pada setiap masing-masing kabupaten/kota dan sistem perhitungannya dapat dilihat dari perkembangan sektor industri yang bersangkutan.

Para ekonom dan para pembuat kebijakan berpendapat bahwa keringanan pajak merupakan cara yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan bagi para pekerja. Dalam keringanan pajak pendapatan yang diterima berupa jumlah yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari pajak yang ditanggung oleh keluarga para pekerja. Namun kelemahan untuk mengurangi biaya pajak akan dapat melemahkan penerimaan pajak pemerintah.

Upah minimum terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, namun dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan, sehingga sering dapat menimbulkan setuju dan tidak setuju bagi perusahaan. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang akan diberikan secara tetap tanpa melihat tingkat kehadiran pekerja ataupun output, misalnya tunjangan keluarga tetap.

**b. Upah Efisiensi**

Teori ini menjelaskan bahwa upah yang tinggi akan membuat para pekerja akan lebih produktif. Pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja akan dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memotong upah walaupun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Meskipun akan terdapat mengurangi tagihan upah perusahaan, pengurangan upah juga dapat terjadi jika teori itu benar dapat merendahkan kemampuan pekerja dan laba pekerjaan. Teori ini lebih banyak digunakan di negara-negara miskin, menyatakan bahwa pengaruh teori ini dapat mempengaruhi nutrisi dan para pekerja yang lebih baik maka akan menghasilkan yang lebih produktif. Perusahaan akan beroperasi jika pembayaran lebih efisien pekerjanya dengan upah yang tinggi, maka perusahaan dapat menganggap bahwa mempertahankan upah diatas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan adalah menguntungkan.

### 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dapat dihasilkan berdasarkan kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun (Khanela dkk., 2017). Produk Domestik Regional bruto terdiri dari dua harga yaitu sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan merupakan nilai dari suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai acuan atau tahun dasar untuk harga tersebut.
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku merupakan nilai dari suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi biasanya dapat digunakan untuk menilai seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu yang tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang (Putri dan Poerwono, 2013). PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga

konstan dan PDRB menurut harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Jadi perekonomian dinyatakan tumbuh apabila terjadi pertumbuhan output riil.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan yaitu:

1. Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai dan jasa akhir yang dapat dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka yang tertentu.
2. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang dapat diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu yang tertentu.
3. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, konsumsi pemerintah pembentukan modal bruto, perubahan stok dan ekspor neto.

Untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggunakan salah satu yaitu metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran ini digunakan untuk menghitung nilai

barang dan jasa yang dikeluarkan oleh berbagai kelompok masyarakat, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = C + I + G + (x-m) \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana:

C = Pengeluaran konsumsi rumah tangga

I = Investasi

G = pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah

(x-m) = selisih nilai ekspor dan impor

Untuk dapat mengetahui pembangunan dan pertumbuhan neo klasik dengan menitikberatkan pada fungsi cobb-douglas.

#### 4. Akses Sanitasi

Sanitasi merupakan tindakan dari seseorang terhadap lingkungan yang berada di sekitarnya supaya lingkungan terkondisikan bebas dari penyakit dan selalu bersih. Lingkungan yang bersih dan sehat akan terbebas dari suatu penyakit. Secara keseluruhan sanitasi adalah penerapan dari prinsip-prinsip yang akan membantu mempertahankan, memperbaiki atau mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia. Penerapan sanitasi sangat penting untuk dilakukan karena berdampak baik pada kesehatan manusia.

Menurut dokumen MDGs membatasi pengertian sanitasi sebagai akses terhadap jamban. Namun menurut lembaga-lembaga internasional seperti WHO sanitasi layak adalah sebuah jamban yang memiliki sistem pembuangan limbah yang tidak mencemari

lingkungan. Maka lembaga tersebut menggunakan konsep sebagai tolak ukur target MDGs (Adhi, 2009). Sementara itu sanitasi dalam industri makanan berarti membersihkan seluruh permukaan baik lantai, meja dan peralatan, maupun pekerja yang bersentuhan dengan produk makanan melalui perlakuan yang efektif dalam memusnahkan mikrobia yang membahayakan kesehatan masyarakat dan secara substansial mengurangi jumlah mikrobia yang tidak diinginkan lainnya tanpa mengganggu keamanan makanan bagi konsumen. Dengan demikian sanitasi mencakup pada bidang pangan, dilakukan pada semua benda yang terkontak langsung dengan makanan.

Derajat kesehatan yang tinggi harus didukung dengan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang baik. Pembangunan sanitasi dapat dibagi menjadi tiga bidang yaitu pembangunan bidang pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah dan saluran pembuangan. Pembangunan ketiga bidang sanitasi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan (Soeranto, 2004). Pembangunan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, yang termasuk indikator keberhasilannya selalu diukur dari indeks Tingkat Harapan Hidup, Tingkat Kematian Bayi, dan Angka Penyakit yang disebabkan oleh air contohnya demam berdarah, diare dan tifus. Tetapi Indonesia selalu minim dalam pendapatan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan sanitasi layak.

Pembangunan bidang terdapat dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* yang mencakup 8 tujuan dan 18 target. Berdasarkan tujuan 7 dari MDGs yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pada target 1 dan 11 terdapat keterkaitan antara masalah akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat. MDGs mendeskripsikan bahwa terdapat interdependensi antara akses air minum dan sanitasi. Pembangunan dan perbaikan bidang sanitasi secara tidak langsung akan meningkatkan pembangunan ekonomi.

## **5. Jumlah Sekolah**

Berdasarkan pada Undang-Undang No.2 tahun 1989 sekolah merupakan satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah merupakan suatu lembaga untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian dari integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan konsisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya yang bersifat aktif dan kreatif artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik (Pauziah, 2017).

Pendidikan merupakan suatu permasalahan yang besar menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Karena itu,

tuntutan reformasi politik, ekonomi, hak azasi manusia, sosial dan sistem pemerintahan tidak dapat membuahkan hasil yang baik tanpa reformasi pendidikan. krisis multidimensi yang melanda Negara Indonesia tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi melainkan dengan krisis pada system pendidikan. Kajian relasi antara pendidikan dan pembangunan manusia memang sudah banyak dilakukan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat adalah dengan cara melalui jalam pengembangan pendidikan. Banyak diyakini bahwa tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menghasilkan korelasi positif dengan tingkat penghasilan atau kemakmuran yang tinggi. Pendidikan merupakan bidang sentral yang harus dijalankan dengan serius untuk dapat mempercepat pembangunan manusia (Rubiyatno, 2012).

Pada saat ini kata sekolah telah berubah artinya menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran. Setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan kepala sekolah dibantu oleh wakilnya. Bangunan sekolah disusun secara meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana pada suatu sekolah memiliki peranan penting dalam terlaksananya proses pendidikan (Brahmono dkk., 2017). Ukuran dan jenis sekolah bervariasi tergantung dari sumber daya dan tujuan penyelenggara

pendidikan. Sebuah sekolah mungkin sangat sederhana di mana sebuah lokasi tempat bertemu seorang pengajar dan beberapa peserta didik, atau mungkin, sebuah kompleks bangunan besar dengan ratusan ruang dengan puluhan ribu tenaga kependidikan dan peserta didiknya.

Pada tanggal 16 Mei diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar sekolah nasional pendidikan. Dengan PP 19/2005 itu, semua sekolah di Indonesia diarahkan dapat menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar nasional. Tingkat pendidikan individu penduduk merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan yang tinggi dapat menentukan kemampuan untuk mengelola dan menyerap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitan teknologi maupun kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri untuk mencapai perekonomian yang maju.

## **B. Hubungan Antar Variabel**

### **1. Hubungan Upah Minimum dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).**

Tingkat upah minimum tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak buruh dan masih jauh dari pengeluaran riil buruh dengan upah yang didapatnya. Rendahnya daya upah minimum dapat

menjadikan beban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Minimnya tingkat upah minimum yang diterima oleh para buruh secara tidak langsung dapat mempengaruhi produktivitas buruh dan daya saing sumber daya manusia menjadi rendah (Sari & Priati, 2016).

2. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi akan menjadikan pembangunan manusia menjadi lebih baik lagi, begitu pula sebaliknya. Sementara itu kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia adalah dengan meningkatkan pendapatan pemerintah yang kemudian dapat diinvestasikan untuk pembangunan manusia.

3. Hubungan Akses Sanitasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salahsatu indikator dari IPM adalah kesehatan dan panjangnya umur yang dilihat dari angka harapan hidup. Kesehatan yang tinggi harus didukung dengan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang

baik. Pembangunan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, yang termasuk indikator keberhasilannya selalu diukur dari Indeks Tingkat Harapan Hidup, Indeks Tingkat Kematian Bayi dan Angka Penyakit yang disebabkan oleh air contohnya demam berdarah, diare dan tifus. Akan tetapi Indonesia selalu minim dalam pendapatan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan sanitasi layak (Soeranto, 2004).

#### 4. Hubungan Jumlah Sekolah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Investasi dalam hal pendidikan sangat dibutuhkan maka pemerintah harus membangun suatu sarana dan system pendidikan yang baik. Karena pengeluaran pembangunan dalam sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

### **C. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Bhakti dkk, (2017) telah melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012”. Variabel yang digunakan dalam penelitian

tersebut yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Rasio Ketergantungan, Konsumsi Rumah Tangga Untuk Makanan, APBD Untuk Pendidikan dan Kesehatan. Menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan (IPM) di Indonesia, Rasio Ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Konsumsi Rumah Tangga Untuk Makanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), APBD Untuk Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), APBD Untuk Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Ismanti, (2017) meneliti tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan judul “Pengaruh Faktor Pendidikan, Konsumsi Protein, Konsumsi Kalori, dan Upah Terhadap Pembangunan Manusia Bangsa Indonesia”. Dengan menggunakan variabel Pendidikan, konsumsi protein, Konsumsi Kalori dan Upah. Menggunakan metode survei dengan teknik korelasional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendidikan, Konsumsi Protein, Konsumsi Kalori dan Upah terhadap peningkatan Indeks Pembangunan manusia sebesar 98,9 persen

dan sisanya 1,1 persen dari variabel bebas lainnya diluar penelitian.

3. Meydiasari, (2017) telah melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berjudul “Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM di Indonesia”. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Distribusi Pendapatan, TPT, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan. Dengan menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Distribusi Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia (IPM). Sedangkan variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia (IPM).
4. Latuconsina, (2017) telah melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berjudul “Pengaruh PDRB dan kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”. Terdapat variabel PDRB dan kemiskinan. Dan menggunakan regresi Linier Berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara PDRB dan kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan

PDRB dan kemiskinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia (IPM).

5. Melliana & Zain, (2013) telah melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat beberapa variabel yaitu variabel Rasio Siswa Terhadap Guru, Angka Partisipasi SMP/MTs, Jumlah Sarana Kesehatan, Persentase RT Dengan Sanitasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Kepadatan Penduduk, dan PDRB Perkapita. Menggunakan metode Regresi Data Panel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel APS, RT Dengan Akses Sanitasi, TPAK, dan PDRB Perkapita memiliki hubungan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan variabel Jumlah Sarana Kesehatan, dan Rasio Guru terhadap siswa selama delapan tahun menunjukkan hasil yang negatif. Variabel rasio sekolah terhadap siswa dan kepadatan penduduk setiap tahun mengalami pergerakan yang tidak menentu.
6. Dewi, (2014) telah meneliti tentang Indeks Pembangunan Manusia. Dengan judul “Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2009-2011”. Penelitian tersebut menggunakan variabel Jumlah Sekolah, Upah Minimum Regional, dan Jumlah Rumah Sakit. Dengan menggunakan metode regresi data Panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Sekolah dan Upah Minimum Regional Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan jumlah

rumah sakit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

7. Niswaty, Mano, & Akib, (2015) telah meneliti tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Yang berjudul “Analisis Kinerja Layanan Publik Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Makassar, Indonesia”. Dengan variabel Kinerja dan Layanan Publik. Metode yang digunakan adalah Analisis Deskriptif ex Post Facto. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kinerja dan layanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusi (IPM).
8. Abdul Majid dkk., (2015) telah meneliti tentang Indeks Pembambunan Manusia (IPM). Yang berjudul “Studi Dampak Pemerintah Dan Ukuran Pemerintah Pada Indeks Pembangunan Manuisa Di Sumatra Utara, Indonesia”.dengan beberapa variabel sebagai berikut Kompleksitas pemerintah dan ukuran pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode pengambilan sampel acak prospektif kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial bahwa variabel Kompleksitas Pemerintah dan variabel Ukuran Pemerintah daerah secara bersamaan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatra Utara.
9. Arisman, (2018) telah meneliti penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Yang berjudul tentang “Penentuan

Indeks Pembangunan Manusia di Negara-negara ASEAN”. Dengan variabel Tingkat Pertumbuhan Populasi, Pendapatan Perkapita, Inflasi, Tingkat Pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Data Panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pertumbuhan Populasi dan pendapatan Perkapita mempengaruhi Indeks Indeks Pembangunan Manusia di Negara-negara anggota ASEAN sedangkan variabel Inflasi dan Tingkat Pengangguran tidak memiliki dampak Terhadap Indeks Pembangunan Manusi (IPM).

10. Lestari & Sanar, (2018) telah meneliti tentang penelitian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Yang berjudul “Indikator Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Pendapan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### **D. Hipotesis**

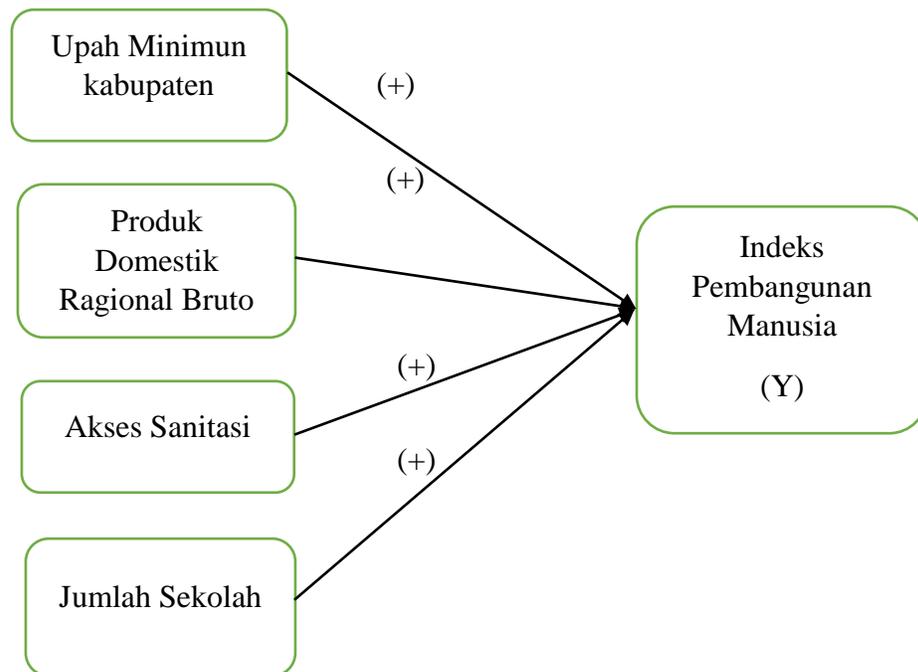
Hipotesis penelitian adalah suatu dugaan yang masih bersifat sementara. Berawal dari berbagai permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan yang ingin dicapai dengan berlandaskan teori-teori yang

telah dikemukakan oleh para ahli. Berikut adalah hipotesis penelitian sebagai berikut:

- a) Diduga variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.
- b) Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat.
- c) Diduga variabel Akses Sanitasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.
- d) Diduga variabel Jumlah Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi jawa Barat.

#### **E. Model Penelitian**

Model penelitian digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:



**GAMBAR 2.2**

**Hubungan Antara Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Sanitasi Layak dan Jumlah Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**